

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama beberapa dekade, perdagangan senjata telah menjadi salah satu bisnis paling menguntungkan di dunia dengan peningkatan yang dapat diprediksi dari tahun ke tahun. Rusia, sebagai negara yang melakukan perdagangan senjata internasional memainkan peran integral dalam mempertahankan citranya sebagai kekuatan dunia, serta sebagai bagian penting dari hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan yang diminati. Presiden Vladimir Putin dari Federasi Rusia menyatakan dengan tegas bahwa Rusia melihat kerja sama militer aktif (istilah resmi Rusia yang digunakan untuk menggambarkan ekspor senjata) sebagai instrumen yang efektif untuk mencapai kepentingan nasional. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia melihat dunia melalui lensa *zero-sum anti-Westernisme*, dimana Rusia yang bangkit kembali sebagai kekuatan besar internasional berusaha mencegah Barat mendominasi wilayah manapun dan mengekang dukungan Barat.

Pada saat ini Rusia menempati nomor dua setelah Amerika Serikat sebagai pengeksport senjata utama yang memasok ke Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur, dimana sebelumnya pengaruh Barat lebih kuat daripada Rusia (Wong, 2020). Beberapa tahun terakhir, kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara muncul sebagai pasar senjata terpenting kedua setelah Asia. Rusia telah membuat langkah besar di wilayah ini sejak Vladimir Putin berkuasa terutama dalam beberapa tahun terakhir setelah memulai reformasi militer besar-besaran pada tahun 2008 (Borshchevskaya, 2017).

Nilai ekspor untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara mencapai US\$6 miliar per tahun, sehingga pada lima tahun terakhir nilai serta pangsa pasar untuk produk Rusia cukup stabil. Hubungan yang telah terjalin selama 15 tahun

dan atas dasar kepercayaan, membuat Rusia cukup lancar dalam membuat arus ekspor produk militer ke Timur Tengah dan Afrika (Widodo, 2021). Kemunculan Rusia ini adalah untuk mendominasi pasar senjata dan melakukan upaya bersama merebut kembali perannya sebagai pemasok senjata pilihan yang kredibel bagi kawasan Timur Tengah. Dalam kebijakan luar negerinya, Suriah merupakan titik penting Timur Tengah, sehingga penjualan senjata ke negara ini merupakan kekuatan politik bagi Rusia.

Damaskus secara historis bukan hanya sekutu terdekat Moskow di dunia Arab, tetapi juga salah satu pelanggan senjata terbesarnya. Suriah telah menjadi pelanggan setia senjata Rusia sejak perang Arab-Israel pada tahun 1973, ketika menggunakan senjata buatan Soviet untuk melawan Israel yang sebagian besar dipasok oleh Amerika Serikat. Putin meningkatkan hubungan bilateral lebih lanjut setelah bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad pada Januari 2005. Sebelum pecahnya perang, pemerintah Suriah melakukan upaya untuk memodernisasi militernya, berinvestasi besar-besaran dalam teknologi canggih dan meningkatkan impor senjata secara eksponensial selama rentang lima tahun. Rusia terutama bertanggung jawab untuk mengisi persediaan pemerintah Suriah, meskipun negara-negara lain seperti Iran, Belarus, Cina, dan Korea Utara juga secara historis memasok senjata ke pemerintah Suriah (Dick, 2019).

Menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Rusia memasok 71 persen impor senjata konvensional utama Suriah dari 2008-2012, dan terus menyediakan senjata untuk pasukan pemerintah setelah perang dimulai. Ketika protes anti-al-Assad pecah di Damaskus pada Maret 2011, Putin mendukung presiden Suriah dengan tegas dan dalam berbagai cara, secara politik, diplomatik, dan ekonomi. Namun intervensi Rusia di Suriah pada September 2015 telah mengubah permainan yang secara resmi mengembalikan Rusia ke Timur Tengah. Pada awal Oktober 2015, hanya beberapa hari setelah meluncurkan intervensinya,

Rusia menembakkan 26 rudal jelajah dari Armada Laut Kaspia. Dilihat dari perspektif penjualan senjata, hal tersebut adalah arena periklanan yang memadai bagi Rusia. (Borshchevskaya, 2017).

Setelah 10 tahun lamanya Perang Saudara berlangsung di Suriah, tidak menghalangi Rusia untuk tetap mengeksport senjatanya. Selama berlangsungnya konflik Suriah, penjualan senjata dari Rusia mengalami peningkatan terhadap negara tersebut. Jumlah perdagangan senjata Rusia ke Suriah sebelum terjadinya perang, tepatnya pada tahun 2001 hingga 2010 mencapai 2.105 senjata dengan rincian pemesanan pada tahun 2002 yang dikirim tahun 2002-2003 mencapai 1.000, pemesanan pada tahun 2004 yang dikirim tahun 2005 mencapai 250, pemesanan pada tahun 2005 yang dikirim tahun 2006 mencapai 200, pemesanan pada tahun 2005 yang dikirim tahun 2006 mencapai 250, pemesanan pada tahun 2006 yang dikirim tahun 2008-2013 mencapai 36, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2013 mencapai 8, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2011 mencapai 2, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2011 mencapai 72, pemesanan pada tahun 2008 yang dikirim tahun 2008-2010 mencapai 200, pemesanan pada tahun 2009 yang dikirim tahun 2009-2010 mencapai 87 (SIPRI, 2022).

Jumlah perdagangan senjata Rusia ke Suriah setelah terjadinya perang, tepatnya pada tahun 2011 hingga 2020 mencapai 2.474 senjata dengan rincian pemesanan pada tahun 2015 yang dikirim pada tahun itu juga mencapai 10, pemesanan pada tahun 2016 yang dikirim tahun 2017-2021 mencapai 4, pemesanan pada tahun 2016 yang dikirim tahun 2017 mencapai 25, pemesanan pada tahun 2017 yang dikirim pada tahun itu juga mencapai 10, pemesanan pada tahun 2006 yang dikirim tahun 2008-2013 mencapai 900, pemesanan pada tahun 2006 yang dikirim tahun 2008-2013 mencapai 36, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2013 mencapai 800, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2013 mencapai 8, pemesanan pada tahun 2007 yang

dikirim tahun 2010-2011 mencapai 2, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2011 mencapai 12, pemesanan pada tahun 2007 yang dikirim tahun 2010-2011 mencapai 72, pemesanan pada tahun 2010 yang dikirim tahun 2012-2013 mencapai 100, pemesanan pada tahun 2010 yang dikirim tahun 2012-2013 mencapai 50, pemesanan pada tahun 2014 yang dikirim pada tahun itu juga mencapai 36, pemesanan pada tahun 2018 yang dikirim pada tahun itu juga mencapai 200, pemesanan pada tahun 2018 yang dikirim pada tahun itu juga mencapai 3, pemesanan pada tahun 2019 yang dikirim tahun 2020 mencapai 100, pemesanan pada tahun 2020 yang dikirim pada tahun itu juga mencapai 6, pemesanan pada tahun 2020 yang dikirim tahun 2020-2021 mencapai 100 (SIPRI, 2022).. Dapat dilihat bahwa perdagangan senjata dari Rusia ke Suriah dalam kurun waktu sepuluh tahun sebelum dan sesudah konflik masing-masing adalah 2.105 dan 2.474, hal ini menunjukkan bahwa selama berlangsungnya perang saudara Suriah telah terjadi peningkatan penjualan senjata dari Rusia ke Suriah.

Pangsa ekspor senjata global Rusia adalah 21 persen pada 2015-2019, menjadikannya eksportir terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat menurut angka dari SIPRI. Senjata terkemuka yang dibeli dan digunakan oleh aliansi Rusia-Suriah beberapanya adalah munisi tandan, bom barel, senjata pembakar, rudal paku, senjata kimia pemusnah massal, senjata peledak (termasuk bom, roket, dan artileri), beberapa jenis pesawat, dan helikopter. Jaringan Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan pada Mei 2020 setidaknya 882 serangan di dan sekitar Idlib terhadap infrastruktur sipil sejak April 2019 (HRW, 2020).

Pemerintah Rusia mulai melakukan operasi militer di Suriah pada 30 September 2015. Sejak itu, serangan udara Rusia-Suriah telah menghantam fasilitas sipil dan menyebabkan ratusan korban jiwa. Perang Saudara Suriah merupakan salah satu konflik paling mematikan yang sedang berlangsung di dunia. Semua pihak dalam konflik

memanfaatkan serangkaian senjata konvensional dan senjata non-konvensional, seperti senjata kimia yang sebagian besar digunakan oleh rezim Assad untuk mempertahankan konflik. Suriah dipenuhi dengan senjata yang kemudian meningkatkan kekhawatiran terhadap konsekuensi jangka panjang dari pasokan senjata di tengah Perang Saudara yang sedang berlangsung (Dick, 2019). Perang di Suriah terus memberi Rusia tempat pembuktian untuk sistem senjata baru atau yang ditingkatkan, pengembangan taktik, teknik, dan prosedur untuk menggunakannya.

Sejak awal 1990-an telah ada upaya untuk meninjau dan mengembangkan prinsip-prinsip transfer senjata dan kode etik untuk memastikan bahwa senjata tidak dijual kepada pelanggar hak asasi manusia. Prinsip tersebut diantaranya semua transfer senjata internasional harus disahkan oleh negara yang diakui dan dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur nasional yang mencerminkan, minimal kewajiban negara dibawah hukum internasional; negara-negara tidak boleh mengizinkan transfer senjata internasional yang akan melanggar kewajiban mereka yang dinyatakan mengenai senjata di bawah hukum internasional; negara-negara tidak boleh mengizinkan transfer senjata dimana senjata itu akan digunakan atau kemungkinan akan digunakan untuk pelanggaran hukum internasional; negara-negara harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk kemungkinan penggunaan senjata, sebelum mengizinkan transfer senjata; negara-negara harus menyerahkan kepada registri internasional laporan tahunan nasional yang komprehensif tentang transfer senjata internasional, dan registri harus menerbitkan laporan tahunan yang dikomilasi, komprehensif, internasional; dan negara-negara harus menetapkan standar umum untuk mekanisme khusus untuk mengontrol semua aspek transfer senjata, termasuk perantara, produksi berlisensi dll, serta ketentuan operasional untuk memperkuat implementasi.

Sedangkan kode etik diantaranya meliputi tidak menjual senjata kepada rezim non-demokratis, atau rezim yang akan menggunakan senjata tersebut untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia; tidak menjual senjata yang dapat memicu konflik internal atau eksternal; dan tidak menjual senjata yang dapat merusak pembangunan dan dengan demikian meningkatkan kemiskinan. (Shah, 2008). Resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 5 Desember 2013 (A/RES/68/31) tentang Perjanjian Perdagangan Senjata, berupaya melarang transfer senjata yang tidak bertanggung jawab dan mencegah pengiriman senjata ke zona konflik dimana senjata tersebut cenderung memperburuk keadaan dan berkontribusi pada penindasan serta pelanggaran hak asasi manusia (UNRCPD).

Untuk menghentikan aliran senjata, amunisi, dan barang-barang terkait ke negara-negara yang diketahui akan digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius tercantum dalam perjanjian perdagangan senjata atau Arms Trade Treaty (ATT). Melalui perjanjian tersebut, jika ekspor senjata yang diusulkan ke negara lain akan digunakan untuk atau berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius maka senjata tersebut tidak boleh diperjualbelikan (Amnesty, 2014). Menjual senjata ke negara-negara yang berkonflik akan membuat konflik menjadi lebih mematikan dan bertahan lama dikarenakan pembelian senjata cenderung meningkatkan ketegangan antar atau di dalam negara. Di bawah hukum internasional, memberikan senjata ke Suriah sementara pasukannya diketahui melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat diartikan terlibat dalam membantu dan bersekongkol untuk melakukan kejahatan tersebut. Pemasok senjata dapat menanggung potensi pertanggungjawaban pidana dari kejahatan tersebut dan dapat menghadapi tuntutan hukum.

Human Rights Watch sudah bertahun-tahun meminta Rosoboronexport (perantara yang dikendalikan Rusia di bidang ekspor dan impor untuk seluruh jajaran produk, teknologi, dan layanan militer) untuk menghentikan transaksi senjata dengan pemerintah Suriah dan juga mendesak komunitas internasional untuk membatasi peluang perusahaan melakukan penjualan. Sebaliknya, Rosoboronexport masih memasarkan senjata yang diuji di Suriah dalam berbagai pameran, sementara warga sipil menjadi korban (Fakih, 2018). Operasi militer gabungan Rusia-Suriah telah banyak menggunakan senjata yang dilarang secara internasional, hal ini telah menghancurkan objek dan infrastruktur sipil.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini pertanyaan yang penulis rumuskan adalah “Mengapa Rusia tetap melakukan transfer senjata ke Suriah pada saat berlangsungnya Perang Saudara?”

1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan analisa terhadap permasalahan, maka diperlukan suatu kerangka teoritis, disini peneliti menggunakan konsep *balance of power* dan konsep perdagangan senjata untuk menganalisis alasan mengapa transfer senjata oleh Rusia ke Suriah masih berlangsung disaat berlangsungnya Perang Saudara.

1.3.1 Konsep *Balance of Power* (Keseimbangan Kekuatan)

Keseimbangan kekuatan, sebuah gagasan bahwa negara secara sadar atau tidak sadar berjuang menuju distribusi kekuatan yang setara untuk menghindari dominasi oleh satu pihak, merupakan konsep inti untuk studi politik internasional. Menurut Schweller, *Balance of Power* atau keseimbangan kekuatan adalah penciptaan atau penggabungan kekuatan militer baik melalui mobilisasi internal atau pembentukan aliansi untuk mencegah atau

menghalangi pendudukan dan dominasi negara oleh kekuatan atau koalisi asing. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah hilangnya wilayah, baik tanah air atau kepentingan vital di luar negeri (misalnya, alur laut, koloni, atau wilayah lain yang dianggap sebagai kepentingan strategis vital) (Schweller, 2006).

Dalam istilah keseimbangan kekuatan, biasanya ada negara yang dominan pada saat tertentu. Negara ini disebut sebagai hegemon, dimana negara dengan kemampuan politik, ekonomi, atau militer yang dominan atas negara lain. Hegemoni adalah pusat keseimbangan kekuatan yang juga mewakili potensi ancaman keamanan bagi negara lain. Ketika satu negara mengumpulkan kekuatan yang lebih dari cukup, ia dapat meluncurkan serangan sepihak terhadap wilayah negara berdaulat lain dan menggunakan ekonomi atau alat perdagangan diplomatik atau militer lainnya untuk mencapai tujuannya. Fokus kekuatan inilah yang mendorong negara-negara lain bekerja sama untuk mencapai keseimbangan kekuatan. Sistem keseimbangan kekuatan mencakup keberadaan setidaknya dua atau lebih aktor dengan kekuatan yang kira-kira setara, dimana negara-negara berusaha untuk bertahan hidup dan mempertahankan otonomi, fleksibilitas aliansi, dan kemampuan untuk menggunakan perang jika perlu.

Konsep keseimbangan kekuatan dalam hubungan internasional diartikan sebagai suatu sistem dimana satu blok kekuatan yang mengarah pada munculnya kekuatan lain dan pada akhirnya mengarah pada jaringan aliansi. Yang artinya konsep keseimbangan kekuatan bertumpu pada asumsi bahwa kekuatan yang berlebihan merupakan ancaman bagi keberadaan unit lain. Sebagai sebuah kebijakan, keseimbangan kekuatan menunjukkan bahwa negara-negara melawan setiap ancaman terhadap keamanan

mereka dengan bersekutu dengan negara-negara lain yang terancam dan dengan meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri. Negara dapat mengejar kebijakan keseimbangan kekuatan dengan dua cara yaitu dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, seperti ketika terlibat dalam perlombaan persenjataan atau dalam perolehan wilayah secara kompetitif atau dengan menambah kekuatan mereka sendiri dari negara lain, seperti ketika memulai kebijakan aliansi.

Konsep keseimbangan kekuatan telah digunakan dalam berbagai cara dengan banyak arti yang berbeda. Misalnya, secara sederhana dapat berupa definisi tentang bagaimana politik internasional berdiri pada saat tertentu, bisa untuk merumuskan pembuatan kebijakan, menjadi ideologi seperti pandangan politik lainnya, atau digunakan sebagai propaganda untuk mempengaruhi publik. Sementara keseimbangan kekuatan merupakan konsep abstrak yang memungkinkan penggambaran pola umum politik internasional, keseimbangan juga telah digunakan untuk merumuskan kebijakan luar negeri dan melakukan manuver diplomatik. Maksud atau tujuan dari keseimbangan kekuatan adalah untuk menjaga integritas sistem multinegara dengan mencegah negara ambisius mengusik negara lain. Sarana untuk mencapai tujuan ini bisa dengan melalui senjata dan sekutu dimana negara mengimbangi akumulasi kekuatan yang mengancam dengan membangun senjata (penyeimbangan internal) dan membentuk aliansi (penyeimbangan eksternal) yang berfungsi untuk mengumpulkan militer satu sama lain.

Dalam mencapai keseimbangan kekuatan, pertentangan saat ini sebagian besar digantikan oleh perlombaan senjata besar-besaran yang produk mematakannya tidak pernah digunakan dan campur tangan politik atau intervensi militer terbatas oleh negara adidaya di berbagai negara Dunia Ketiga.

Negara-negara, terutama negara kuat sangat menekankan persenjataan sebagai sarana untuk mempertahankan atau mengamankan posisi yang menguntungkan. Hal ini juga digunakan sebagai sarana untuk menjauhkan kemungkinan penyerang atau musuh.

Melalui pandangan anti-Baratnya, Rusia ingin menunjukkan dirinya sebagai kekuatan yang sedang bangkit dan kebutuhannya untuk bersaing dengan Barat terutama Amerika Serikat untuk mengembalikan eksistensinya di Timur Tengah. Konflik Suriah telah terbukti menjadi arena yang ideal bagi militer Rusia mengasah keunggulannya, bereksperimen dengan sistem tempur baru, serta menguji dan memperbaiki sistem lama. Karenanya sejak awal perang Suriah, Putin bertekad untuk menjaga agar Assad tidak jatuh dan konflik ini dianggap sebagai alat untuk menunjukkan ambisi yang menegaskan Rusia sebagai kekuatan global.

1.3.2 Konsep Perdagangan Senjata

Perdagangan senjata adalah bagian dari industri global yang dibangun atas dasar permintaan yang kuat dan berkelanjutan. Menurut Barry Buzan, perdagangan senjata merupakan bagian dari proses penyebaran teknologi ke seluruh dunia yang mana peran revolusi teknologi berkelanjutan dan penyebaran senjata menghasilkan dinamika dimana hal tersebut mendorong perdagangan senjata. Salah satu bentuk dari proses penyebaran teknologi dapat melalui promosi dagang yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan volume penjualan baik melalui pameran, periklanan, konflik, dan usaha lain yang bersifat peruasif.

Perdagangan senjata tidak terlepas dari adanya kepentingan antara pemasok dan pembeli, sehingga Barry Buzan menyimpulkan bahwa perdagangan senjata akan tetap menjadi kegiatan yang tahan lama

dalam sistem internasional (Tan, 2010). Istilah perdagangan senjata tidak hanya mengacu pada penjualan senjata internasional, tetapi juga pada transfer senjata atas dasar politik dan pada cara kerja industri persenjataan. Selain itu, transfer senjata tidak lagi dilihat hanya melalui kajian politik, tetapi ekonomi juga memainkan peran sentral dalam memahami motivasi dan konsekuensi dari transfer senjata. Sebelum melakukan ekspor senjata dan peralatan militer, pemasok akan menilai potensi keuntungan ekonomi dan potensi dampak transfer pada kepentingan dan politik luar negeri mereka (Tan, 2020).

Dengan pertumbuhan teknologi dan peningkatan kecanggihan persenjataan sepanjang abad kedua puluh, biaya yang terkait dengan produksi senjata untuk konsumsi domestik meningkat secara substansial. Karena peningkatan biaya dalam produksi, penelitian, dan pengembangan yang meningkat secara signifikan, negara-negara produsen senjata mulai melihat ekspor senjata untuk mengimbangi pengeluaran negaranya. Daya jual senjata kemudian menjadi penting karena produsen senjata menemukan bahwa mereka tidak bisa hanya mengembangkan dan memproduksi senjata untuk pasar kebutuhan domestiknya saja, produsen menyadari bahwa mereka harus mengembangkan dan memproduksi senjata untuk masuk ke pasar internasional.

Untuk memahami pertumbuhan perdagangan senjata, terdapat tiga motivasi mengapa negara terlibat dalam produksi dan penjualan senjata, diantaranya adalah kekuasaan, keamanan, dan ekonomi. Motivasi awal dan utama perdagangan senjata adalah konsumsi domestik, negara mendorong dan mendukung produksi persenjataan untuk memasok pasukan militer mereka dengan tujuan pertahanan nasional dan

ketertiban dalam negeri, namun kemudian penjualan senjata dianggap penting untuk meningkatkan kekuasaan, keamanan, dan ekonomi negara. Ekspor senjata telah memberikan sumbangan finansial yang besar, keuntungan yang signifikan dapat diperoleh dengan memproduksi dan menjual senjata. Oleh karena itu, menghasilkan kekayaan juga telah menjadi alasan utama untuk melakukan perdagangan senjata.

Sebagai bentuk penyebaran teknologi, konflik Perang Saudara Suriah yang masih berlangsung hingga saat ini, telah memberi kesempatan Rusia untuk memamerkan kecanggihannya. Dengan dilakukannya uji coba senjata dalam pertempuran nyata di Suriah telah mendorong peningkatan perdagangan senjata dan membuat Rusia mendapatkan keuntungan terutama dalam bidang ekonomi dimana Rusia mendapatkan klien baru atas penjualan senjatanya. Hal ini menunjukkan bahwa industri senjata Rusia telah menjadi pilar utama ekonomi Rusia yang mana melalui perdagangan senjata telah meningkatkan perekonomian negara Rusia.

1.4 Hipotesa

Kebijakan Rusia untuk tetap melakukan transfer senjata ke Suriah pada saat Perang Saudara berlangsung dilatarbelakangi oleh keinginan Rusia untuk mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dan mempromosikan kecanggihannya di Timur Tengah.

1.5 Tujuan Penelitian

Secara umum, melalui penelitian yang berjudul “Transfer Senjata Rusia ke Suriah era Vladimir Putin”, memiliki tujuan untuk mengetahui alasan dibalik tindakan Rusia yang masih melakukan transfer senjata ke Suriah pada saat berlangsungnya Perang Saudara.

1.6 Metode Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada fenomena dengan menekankan pada makna yang bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau obyek penelitian (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan metode ini untuk melengkapi analisis melalui pengumpulan data berdasarkan informasi yang diperoleh menggunakan data sekunder dari berbagai studi pustaka berupa buku, jurnal, media cetak, situs internet dan website resmi, serta laporan dari berbagai sumber resmi yang relevan dengan hasil penelitian yang disusun.

1.7 Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah dan memfokuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan dalam lingkup waktu pada era kepemimpinan Vladimir Putin antara tahun 2015-2020 dimana dalam rentan waktu tersebut Rusia mulai melakukan intervensi militer di Suriah.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I, membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, membahas hubungan antara Rusia-Suriah dan keterlibatan Rusia dalam Perang Saudara Suriah.

BAB III, membahas strategi Rusia dalam mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dan upaya Rusia melakukan promosi kecanggihan senjatanya di Timur Tengah.

BAB IV, membahas kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.